

**PENGARUH LUAS PENGUNGKAPAN  
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN  
KEBERADAAN *RISK MANAGEMENT*  
*COMMITTEE* TERHADAP AGRESIVITAS  
PAJAK PERUSAHAAN**

(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia Tahun 2009-2013)



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**WAHYU INDAH KURNIASARI**  
**NIM. 12030111130168**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2015**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Wahyu Indah Kurniasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130168  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH LUAS PENGUNGKAPAN  
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
DAN KEBERADAAN *RISK MANAGEMENT*  
*COMMITTEE* TERHADAP AGRESIVITAS  
PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada  
Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di  
BEI Tahun 2009-2013)**

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.

Semarang, 25 Maret 2015

Dosen Pembimbing,

(Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.)

NIP. 195805251991032001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Wahyu Indah Kurniasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130168  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH LUAS PENGUNGKAPAN  
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
DAN KEBERADAAN *RISK MANAGEMENT*  
*COMMITTEE* TERHADAP AGRESIVITAS  
PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada  
Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di  
BEI Tahun 2009-2013)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 April 2015**

**Tim Penguji:**

1. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. (.....)
2. Dr. Indira Januarti, S.E., M.Si., Akt. (.....)
3. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Wahyu Indah Kurniasari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Keberadaan *Risk Management Committee* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2013)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 25 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,

(Wahyu Indah Kurniasari)

NIM. 12030111130168

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

*(Q.S. Al-Baqarah: 286)*

*“...Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. ”*

*(Q.S. al –Insyirah 5-8)*

*"Life is not about how to survive in the storm,  
it's about learning to dance in the rain"*

*-Taylor Swift-*

***Skripsi ini saya persembahkan untuk:***

***Bapak, Ibu dan Kedua Kakakku tercinta***

***You're the greatest gift that God ever gave***

***Thank you for being the angels of my life***

***Love you...***

## ***ABSTRACT***

*This study aims to examine the effect of corporate social responsibility (CSR) disclosure and the existence of Risk Management Committee (RMC) to corporate tax aggressiveness. Only one control variable used in this study is firm size.*

*The population in this study consists of all mining companies that listed on The Indonesia Stock Exchange in period 2009-2013 as the sample. Samples were selected by purposive sampling method. There are 93 mining companies that become the samples of this study. Data were analyzed using multiple regression analysis model.*

*The result shows that the CSR disclosure and the existence of RMC significantly negative relate to corporate tax aggressiveness.*

*Keywords: corporate social responsibility, risk management committee, and tax aggressiveness*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan keberadaan *Risk Management Committee* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Penelitian menggunakan satu variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan.

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah 93 perusahaan. Data dianalisis dengan menggunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression*).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan keberadaan *Risk Management Committee* berpengaruh secara negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Kata Kunci: *corporate social responsibility*, *risk management committee*, dan agresivitas pajak

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya maka penulisan skripsi dengan judul "**PENGARUH LUAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN KEBERADAAN *RISK MANAGEMENT COMMITTEE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2013)**" dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan nasihat, serta meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah memberikan nasihat dan arahan selama proses perwalian.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta seluruh staf tata usaha yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suhadak dan Ibu Gunarti yang selalu mendoakan penulis, memberikan nasihat, semangat, serta dukungan moral dan material dalam setiap langkah penulis.

6. Kakak-kakakku tersayang, Wahyu Eko Prasetyo dan Wahyu Adhy Noor Sulityo. Terima kasih untuk doa, motivasi, dukungan, dan semangat yang selalu kalian tularkan.
7. Reny Kartika Sari, Edningsari Dewi Oktaritama, Clara Dewi Novitasari, Agustina Dewi Nugraheni, dan Risha Aristiani Nurwa, terima kasih telah menjadi sahabat baik bagi penulis, yang bersedia mendengarkan keluh kesah penulis ketika mengalami permasalahan. Terima kasih atas motivasi dan pengertian yang diberikan ketika penulis sedang kurang semangat. Terima kasih untuk *support*, canda tawa, keceriaan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama di Semarang. *See you on top, ladies!*
8. Karina Sari dan Zain Fatikhatul Mahawani, teman seperjuangan sejak awal kuliah. Terima kasih untuk dukungan dan motivasinya selama perkuliahan.
9. Niluh Gede Eka Nugrahaning Widhi Swindra, teman dan sahabat yang luar biasa. Terima kasih atas motivasi dan pengertiannya selama ini.
10. Ngadiharjo *lovers*: Dek Chacha, Niken, Bos Fajar, Kunta, Mbak Fida, Septi, Vita, Ike, Wendi, dan Pak Agus. Terima kasih untuk kebersamaan dan dukungannya selama KKN dan hari-hari bahagia setelahnya.
11. Teman-teman kos Pak Hadi: Karin, Anisa, Rahma, Anut, Tiara, Puspita, dan Yohana. Terima kasih atas sambutan hangat dan silaturahmi selama ini.
12. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi : Reny, Nutfi, Aulia, Reza, Adit, Danu, Niko, Bahar, Bang Jol, dan Huda. Terima kasih atas bantuan serta *sharing* ilmu dan pengetahuannya selama proses penulisan skripsi.
13. Teman-teman seperwalian Pak Jaka Isgiyarta : Karina, Andrian, Anisa, Rista, Wisnu, Rusdan, Novita, Nurul, Shofwa, Adit, Hanif, Gilang, Huda, Mukti, Afif, Geys, Fahmi, Ricky, Majid, Winda,

Julieta, dan Ika Fiana. Terima kasih atas semangat, doa, dan dukungan selama kuliah.

14. Teman-teman di organisasi Keluarga Mahasiswa Purworejo-Semarang. Terima kasih telah mengajarkan arti kebersamaan dan berbagi sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bersyukur.
15. Keluarga besar Akuntansi angkatan 2011 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman selama penulis menjalani masa kuliah. Sukses untuk kita semua.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa, bantuan, dan dukungan dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi karya yang lebih baik di masa depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 25 Maret 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	16
2.1 Landasan Teori .....	17
2.1.1 Teori Legitimasi.....	17
2.1.2 Teori Agensi.....	19
2.1.3 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	23
2.1.4 <i>CSR Disclosure</i> .....	24
2.1.5 Manajemen Risiko .....	26

2.1.6 Komite Manajemen Risiko ( <i>Risk Management Committee</i> ) .....	27
2.1.7 Agresivitas Pajak .....	29
2.1.8 Variabel Kontrol .....	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
2.3 Kerangka Pemikiran .....	36
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	37
2.4.1 Pengaruh Luas Pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan .....	37
2.4.2 Pengaruh Keberadaan RMC Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan ...	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	44
3.1.1 Variabel Dependen.....	44
3.1.2 Variabel Independen .....	45
3.1.3 Variabel Kontrol .....	47
3.2 Populasi dan Sampel .....	47
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	48
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	49
3.5 Metode Analisis Data .....	49
3.5.1 Statistik Deskriptif .....	49
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	49
3.5.3 Pengujian Hipotesis .....	52
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	55
4.2 Analisis Data .....	57
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	57
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	59

4.2.3 Analisis Regresi .....	66
4.2.4 Koefisien Determinasi .....	68
4.2.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	69
4.2.6 Uji Signifikansi Prameter Individual (Uji Statistik t) .....	70
4.3 Interpretasi Hasil .....	72
4.3.1 Luas Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan .....	72
4.3.2 Keberadaan <i>Risk Management Committee</i> Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan .....	80
4.3.3 Variabel Kontrol .....	86
BAB V PENUTUP.....	88
5.1 Simpulan.....	88
5.2 Keterbatasan .....	90
5.3 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	93

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 4.1 Pengambilan Sampel .....	49
Tabel 4.2 Statistik Diskriptif .....	50
Tabel 4.3 Uji Normalitas .....	59
Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas .....	61
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi .....	62
Tabel 4.6 Uji Park .....	64
Tabel 4.7 Uji Persamaan Regresi .....	65
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi .....	67
Tabel 4.9 Uji Statistik F .....	69
Tabel 4.10 Uji Statistik t .....	70
Tabel 4.11 .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	33
Gambar 4.1	<i>Scatterplot</i> .....	63

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 .....	76
Grafik 4.2 .....	77
Grafik 4.3 .....	82

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel.....	98
Lampiran B Indeks Pengukuran CSR Sembiring.....	99
Lampiran C Hasil Tabulasi Data .....	105
Lampiran D Data Outlier.....	108
Lampiran E Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	109
Lampiran F Hasil Uji Asumsi Klasik.....	110
1. Hasil Uji Normalitas.....	110
2. Grafik Hasil Uji Normalitas.....	111
3. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	111
4. Hasil Uji Multikolonieritas.....	112
5. Hasil Uji Autokorelasi (Run Test).....	112
6. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	113
7. Hasil Uji Park.....	113
Lampiran G Hasil Uji Hipotesis.....	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab pertama dalam skripsi ini merupakan pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan beberapa bagian yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan skripsi. Latar belakang penelitian berfungsi sebagai informasi yang relevan untuk membantu perumusan pokok masalah yang akan dibahas. Masalah dalam penelitian dapat berasal dari fenomena bisnis atau data lapangan, ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, atau dari perspektif teori yang digunakan sebagai dasar penelitian.

Latar belakang penelitian berisi penjabaran berbagai alasan yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan keberadaan *Risk Management Committee* terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, kemudian dirumuskan masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Selanjutnya diuraikan tujuan dilakukannya penelitian serta manfaat dari penelitian. Bagian akhir dalam bab ini berisi sistematika penulisan skripsi secara rinci dari bab pertama hingga terakhir.

## 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai yang tercantum dalam UU No. 28 tahun 2007. Bagi sebagian besar negara termasuk Indonesia, pajak merupakan unsur paling penting dalam penerimaan negara. Maka tidak heran jika banyak negara yang menitikberatkan perhatiannya pada sektor perpajakan. Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No.S - 14/PJ.7/2003).

Pajak merupakan salah satu sektor yang berperan penting di dalam perekonomian Indonesia sebagai salah satu sumber pendapatan dan penerimaan negara. Ketentuan pemungutan pajak telah diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”. Pemerintah menggunakan hasil pajak yang diterima untuk melaksanakan tanggung jawab negara demi terciptanya kesejahteraan umum.

Bagi rakyat sebagai wajib pajak, pajak seharusnya dianggap sebagai wujud pengabdian dan peran serta dalam berkontribusi untuk meningkatkan pembangunan nasional. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak di mana perusahaan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar pajak yang

besarnya berdasar dari laba bersih yang dihasilkan. Semakin besar pajak yang dibayar perusahaan, maka pendapatan negara semakin besar. Namun, bagi perusahaan sendiri pajak merupakan beban yang dapat mengurangi jumlah laba bersih yang dihasilkan. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan melalui sektor perpajakan itu bertentangan dengan tujuan perusahaan yang ingin meminimalkan dan mengefisienkan jumlah beban pajak sehingga keuntungan yang diperoleh dapat lebih besar demi kesejahteraan pemilik dan kelangsungan hidup perusahaan.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban dan biaya, maka mereka perlu melakukan usaha dan strategi untuk mengurangi atau meminimalkan jumlah pajak tersebut. Usaha dan strategi tersebut salah satunya melalui tindakan manajemen pajak, dengan tujuan menekan serendah mungkin kewajiban membayar pajaknya. Manajemen pajak adalah alat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba seperti yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang benar agar tidak terjadi pelanggaran norma dan aturan perpajakan atau menjurus pada praktik penghindaran pajak. Namun pada praktiknya perusahaan cenderung untuk memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang cenderung merujuk pada pelanggaran pajak, di mana hal ini lebih dikenal dengan tindakan pajak agresif atau agresivitas pajak. Rego dan Wilson (2008) menjelaskan bahwa tindak pajak agresif adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan

pajak (*tax planning*) yang tepat, yang dapat diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Tindak pajak agresif menurut Lanis dan Richardson (2011) adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak melalui cara-cara yang legal, ilegal, atau kedua-duanya. Tindakan pajak agresif dilakukan dengan tujuan meminimalkan pajak terutang demi mencapai target laba yang optimal (Mangoting, 1999). Lanis dan Richardson (2011) menjelaskan bahwa pajak merupakan faktor pendorong dalam keputusan perusahaan. Tindakan manajerial yang dirancang semata-mata untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan pajak agresif menjadi hal yang semakin umum dilakukan oleh perusahaan di seluruh dunia. Namun demikian, agresivitas pajak perusahaan dapat menghasilkan biaya sekaligus manfaat yang signifikan.

Chen, Chen, Cheng, dan Shevlin (2008) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai “*downward management of taxable income through tax planning activities*”. Balakrishnan, Blouin, dan Guay (2010) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, di mana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Lanis dan Richardson (2013) menjelaskan bahwa agresivitas merupakan kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan guna meminimalkan pembayaran pajaknya melalui cara yang legal, ilegal, atau keduanya.

Beberapa peneliti dan literatur menggunakan istilah yang berbeda untuk menjelaskan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Seperti Khurana dan Moser (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai *tax planning* (manajemen pajak) perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* atau *tax sheltering*. Demikian pula

dengan Desai dan Dharmapala (2006) menyebut agresivitas pajak dengan istilah *tax sheltering* yang merupakan upaya mendesain transaksi yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Meskipun terdapat perbedaan istilah untuk *tax planning* yang dilakukan secara ilegal yakni *tax sheltering* dan *tax evasion*, pada dasarnya keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu usaha perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara yang melanggar undang-undang. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa agresivitas pajak merupakan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui aktivitas *tax planning* dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa semuanya merupakan aktivitas yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak melalui cara legal, ilegal, atau kedua-duanya.

Usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan dapat melalui tindakan pajak agresif seperti perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Kebijakan-kebijakan tersebut dapat diambil perusahaan untuk menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif. Pengukuran tindak pajak agresif atau manajemen pajak perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lanis dan Richardson (2011), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya.

Tindakan perusahaan dalam hal meminimalkan pembayaran pajak pada dasarnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena pembayaran pajak perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan hukum (Lanis dan Richardson, 2013). Lebih jauh menurut Lanis dan Richardson (2013) pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah di mata masyarakat. Tindakan tersebut akan mengubah persepsi masyarakat terhadap perusahaan menjadi negatif.

Menurut Lanis dan Richardson (2011), tindakan agresivitas pajak dapat dianggap sebagai aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Lanis dan Richardson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang rendah dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang sadar akan tanggung jawab sosialnya.

Lanis dan Richardson (2011) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan, meskipun keterlibatan perusahaan dalam pengungkapan CSR tidak wajib. *Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai “bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara perusahaan tersebut beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian” (Pemerintah UK dalam Lanis dan Richardson 2011). Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40

Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Di Indonesia sendiri, sesuai dengan peraturan terkait bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sudah merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan. Hal telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” yang menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di sekitar lokasi operasional perusahaan. Menurut Yasin dkk. (2013:xiv), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak semata-mata berusaha untuk mendapatkan keuntungan finansial saja tapi dalam praktiknya perusahaan bertanggungjawab untuk memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat luas dan lingkungan termasuk pelestarian lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan saat ini adalah konsep yang mensyaratkan organisasi bisnis untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan bertanggung jawab atas dampak kegiatan operasi mereka kepada pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya, serta lingkungan.

Krisis finansial yang berkembang sejak tahun 2007 telah membangunkan kesadaran orang tentang pentingnya pendekatan terintegrasi dalam manajemen risiko (Greuning dan Bratanovic (2011:2)). Manajemen risiko perusahaan merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya perusahaan dan meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan semakin meningkat. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan dari kerugian yang mungkin ditimbulkan, baik yang mengancam profitabilitas perusahaan atau risiko terkait operational lainnya. Perusahaan mengelola risiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan pengelolaan risikonya sehingga perusahaan akan mendapatkan hasil optimal dari operasionalnya.

Risiko adalah sesuatu yang mempengaruhi target pencapaian perusahaan. Salah satu atribut risiko adalah ketidakpastian, baik dari sesuatu yang sudah diketahui maupun dari sesuatu yang belum diketahui (KNKG, 2011). Risiko yang dihadapi perusahaan tidak hanya risiko finansial atas pelaporan akuntansi, tapi risiko bisnis dan risiko operasional yang rumit, termasuk di dalamnya risiko terkait perpajakan dan peraturan perpajakan yang rumit. Oleh sebab itu, diperlukan suatu mekanisme pengelolaan dan pengendalian terkait risiko yang sering disebut manajemen risiko.

Richardson (2013) menerangkan bahwa otoritas pajak menganggap bahwa manajemen risiko menjadi bagian penting dari struktur tata kelola perusahaan (*coporate governance*) yang efektif. Meskipun demikian *stakeholder* perusahaan

merasa khawatir apakah perusahaan yang memiliki sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang memuaskan cukup untuk meringankan risiko perusahaan, termasuk risiko pajak yang berurusan dengan kompleksitas hukum dan peraturan perpajakan, serta ketidakpastian mengenai potensi penafsiran hukum dan penerapan undang-undang perpajakan dan peraturan dalam praktiknya. Penelitian oleh Dyreng *et al.* (2008) dan Rego dan Wilson (2012) menunjukkan hasil di mana bahwa tidak pasti apakah manajemen eksekutif secara eksplisit terlibat dalam strategi pajak agresif atau apakah mereka membuat keputusan yang agresif, terkait investasi, dan keputusan strategis lainnya yang mengarah pada perilaku pajak agresif dalam perusahaan. Ada kemungkinan bahwa perilaku pajak yang agresif secara bersamaan muncul jika struktur tata kelola perusahaan, termasuk sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang lemah dan mekanisme pemantauan terkait audit sendiri kurang dilakukan oleh perusahaan, seperti yang diungkapkan oleh Richardson *et al.* (2013).

Otoritas pajak menganggap bahwa manajemen risiko pajak adalah tanggung jawab Dewan Komisaris (Richardson *et al.*, 2013). Demikian pula dinyatakan oleh Krus dan Orowitz (2009) bahwa untuk mewujudkan program manajemen risiko yang efektif diperlukan peran Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, proses, dan sistem untuk memastikan bahwa risiko pajak dapat diminimalkan dalam perusahaan. Hal ini melibatkan kepastian bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan yang dirancang terutama untuk menghindari pajak perusahaan. Dengan demikian, agresivitas pajak tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga bisa dianggap kegiatan yang

tidak bertanggungjawab secara sosial dan tidak sah, yang memiliki efek merusak pada masyarakat secara keseluruhan.

Dewan Komisaris adalah mekanisme pengendalian risiko yang paling penting, ini sesuai pernyataan Subramaniam *et al.* (2009). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Dewan Komisaris harus memastikan terkait keputusan yang dibuat manajemen, termasuk keputusan dalam pemilihan metode akuntansi dan implikasi aktivitas keuangan lainnya. Dewan Komisaris harus memastikan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen adalah benar dan sesuai dengan aturan dan norma. Dewan Komisaris tidak bekerja sendiri melainkan dapat dibantu oleh beberapa komite agar kinerjanya lebih efektif. Komite-komite tersebut antara lain adalah terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi, dan Komite Remunerasi, di mana masing-masing komite memiliki tugas tertentu dalam rangka membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Masing-masing perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam hal menerapkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internalnya. Sebagian besar masih mendelegasikan fungsi pengawasan risiko pada Komite Audit. Namun, dengan adanya banyak pertimbangan dan kompleksitas mekanisme pengawasan serta pengelolaan dan pengawasan manajemen risiko yang dilakukan oleh Komite Audit, maka banyak perusahaan yang memilih sistem baru yaitu membentuk suatu komite pengawasan risiko terpisah dari Komite Audit, yaitu Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*). Di beberapa perusahaan menyebut Komite Manajemen Risiko ini sebagai Komite Pengawas

Risiko atau ada pula yang menyebut sebagai Komite Pengendali Risiko. *Risk Management Committee* dapat didefinisikan sebagai sebuah *sub committee* dari komite pengawas manajemen yang terpisah dari Komite Audit dan berdiri sendiri, yang menyediakan pembelajaran secara khusus mengenai manajemen risiko perusahaan pada level Dewan Komisaris, mengembangkan fungsi pengawasan risiko pada level Dewan Komisaris, dan mengevaluasi laporan risiko perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Komite ini dibentuk dengan tujuan supaya kinerja pengawasan terkait risiko-risiko perusahaan seperti risiko produk, risiko teknologi, risiko peraturan, risiko kredit, dan lainnya menjadi lebih efektif.

Beberapa tahun belakangan pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) mengalami perkembangan yang cukup signifikan, termasuk di Indonesia. Di Indonesia pun telah dikeluarkan kebijakan pemerintah yang telah mulai mewajibkan adanya pembentukan dan kepemilikan RMC dalam sebuah perusahaan sebagai komite pengawas risiko meskipun secara spesifik baru diwajibkan bagi sektor industri perbankan.

Kaitan antara CSR dengan agresivitas pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti seperti Watson (2011) serta Lanis dan Richardson (2011). Watson menguji hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak. Di dalam penelitiannya Watson (2011) melakukan pengukuran agresivitas pajak dengan menggunakan proksi UTB (*Unrecognized Tax Benefit*). Hasil yang ditemukan adalah bahwa CSR mempunyai efek mengurangi tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan. Sedangkan penelitian yang mengkaitkan antara manajemen risiko secara lebih spesifik sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif belum

dilakukan oleh banyak peneliti, dan penelitian Richardson *et al.*, (2013) adalah yang pertama kalinya dilakukan untuk pengujian secara empiris, khususnya di Australia. Hasilnya adalah bahwa perusahaan yang memiliki sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif, melibatkan auditor eksternal *big-4*, layanan auditor eksternal melibatkan jasa non-audit secara proporsional lebih sedikit dari jasa audit dan komite audit internal lebih independen, maka kecil kemungkinannya untuk menjadi agresif pajak.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2011) dan Richardson *et al.*, (2013). Penelitian ini menguji hubungan antara luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan keberadaan *Risk Management Committee* (RMC) terhadap tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan.

Ada beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini menghilangkan variabel-variabel kontrol yang digunakan pada penelitian Lanis dan Richardson (2011) dan hanya menyertakan satu variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. Kedua, penelitian ini juga menghilangkan beberapa variabel independen dalam penelitian Richardson *et al.*, (2013), yaitu keterlibatan auditor eksternal *big-4*, proporsi layanan auditor eksternal, dan independensi komite audit internal. Ketiga, penelitian ini memproksikan variabel sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif dengan menggunakan variabel keberadaan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) perusahaan dikarenakan ketersediaan data dan informasi terkait

pengukuran. Dan yang terakhir adalah jenis perusahaan yang diambil sebagai sampel penelitian adalah perusahaan pertambangan yang listing di BEI tahun 2009-2013. Pemilihan perusahaan pertambangan untuk dijadikan sampel penelitian adalah karena di Indonesia tidak ada pengelompokan perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan non-agresivitas pajak, hanya saja Direktorat Jenderal Pajak mengindikasikan beberapa sektor perusahaan dicurigai terlibat agresivitas pajak, dan salah satu sektor industri yang diindikasikan memiliki potensi tinggi untuk terlibat atau sudah melakukan adalah sektor pertambangan. Pemilihan tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah untuk mengetahui perkembangan terbaru dari aktivitas operasional perusahaan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perpajakan adalah salah satu permasalahan yang selalu berkembang dalam kehidupan masyarakat. Arti pajak yang dipersepsikan berbeda antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak membuat perpajakan dipandang hal yang membingungkan. Bagi pemerintah sendiri, pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga hal itu dapat menimbulkan niat bagi perusahaan untuk sebisa mungkin meminimalkan beban pajak dengan cara legal, ilegal, atau kedua-duanya. Padahal tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sesuai dengan kaidah CSR. Selain itu tindak agresivitas pajak dipandang sebagai hal yang berisiko terhadap reputasi perusahaan yang memiliki kemungkinan besar akan mengganggu

kelangsungan hidup perusahaan jika hal tersebut terus dilakukan. Melalui pembentukan dan keberadaan Komite Manajemen Risiko perusahaan seharusnya yang mampu melaksanakan mekanisme pengendalian risiko yang efektif, dan sudah seharusnya perusahaan terhindar dari risiko pajak agresif. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab :

1. Apakah luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah Keberadaan *Risk Management Committee* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Keberadaan *Risk Management Committee* terhadap agresivitas pajak perusahaan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam melakukan pengungkapan CSR dan keberadaan RMC, dan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi kemungkinan resiko terjadinya pelanggaran pajak.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak akademis dan penelitian selanjutnya mengenai *Corporate Social Responsibility*, Manajemen Risiko, dan Agresivitas Pajak.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini terdapat gambaran sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional penelitian, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

### **BAB IV : HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum hasil dan analisis penelitian dan analisis hasil penelitian beserta pembahasannya.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian selanjutnya.

## **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Dalam bab telaah pustaka ini akan dibahas mengenai teori dan konsep yang menjadi landasan penelitian dan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Selain itu, akan dijelaskan pula kerangka pemikiran yang digambarkan dalam bentuk skema untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian, dan pengembangan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori pendukung serta penelitian sebelumnya.

Pada bagian pertama, dijelaskan bahwa teori yang menjadi dasar dari penelitian dan mendukung perumusan hipotesis adalah teori legitimasi dan teori agensi. Kemudian dijelaskan pula berbagai konsep yang terkait dengan variabel penelitian. Penelitian terdahulu berisi uraian mengenai penelitian-penelitian dengan tema serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini juga dijelaskan objek yang menjadi penelitian, alat analisis yang digunakan, variabel-variabel dalam penelitian, dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kerangka pemikiran dibuat bertujuan untuk membantu pembaca dalam memahami hubungan antar variabel dan logika yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian terakhir dalam bab ini berisi pengembangan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Hipotesis merupakan pernyataan yang dirumuskan berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu.

## 2.1 Landasan Teori

### 2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi adalah salah satu teori yang banyak disebutkan dalam bidang akuntansi sosial dan lingkungan. Lanis dan Richardson (2011 dan 2013) juga menggunakan teori ini sebagai salah satu perspektif untuk mengembangkan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility disclosure*).

Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Ini sejalan dengan *Legitimacy Theory* yang mana teori ini lebih memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat (Ghozali dan Chariri (2007:412)). Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat.

Konsep legitimasi sendiri merujuk pada adanya semacam kontrak sosial di mana perusahaan bertanggung jawab atas tuntutan masyarakat. Ghozali dan Chariri (2007:413) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan atau organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Teori Legitimasi menyatakan bahwa perusahaan besar akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Perusahaan mengupayakan legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah, maupun masyarakat demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ini dengan kata lain bahwa kelangsungan hidup perusahaan

akan terancam jika masyarakat menganggap perusahaan melanggar kontrak sosial tersebut.

Demi kelangsungan hidup perusahaan, maka perusahaan menyadari penting adanya legitimasi dan kontrak sosial dari masyarakat dan *stakeholder* lainnya kepada perusahaan begitu pula sebaliknya. Untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, perusahaan melakukan aktivitas pertanggungjawaban sosial. Untuk memperoleh legitimasi dari pemerintah maka perusahaan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Sesuai dengan perspektif teori legitimasi bahwa perusahaan yang ingin mendapatkan dukungan dan tanggapan positif dari masyarakat dan *stakeholder* lainnya termasuk pemerintah, maka salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sosial masyarakat, dan melakukan pertanggungjawaban secara sosial atas segala aktivitas operasional yang dilakukan. Jika perusahaan telah melakukan aktivitas sosial dan melakukan pengungkapan sosial secara luas terkait aktivitas sosialnya, maka sudah seharusnya dia menjaga reputasi tersebut di mata masyarakat dan *stakeholder* lainnya, seperti pemerintah, pemegang saham, investor, dan lain-lain. Oleh sebab itu, jika suatu perusahaan yang telah memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat karena aktivitas sosialnya yang luas, tapi masih melakukan tindakan tidak terpuji, seperti agresivitas pajak yang jelas-jelas merugikan salah satu *stakeholder*-nya yaitu pemerintah, maka hal itu akan menghilangkan reputasi baik yang telah perusahaan bentuk sendiri. Jika suatu perusahaan yang telah melakukan dan mengungkapkan aktivitas CSR-nya dengan luas, tapi mereka masih melakukan

tindakan pajak agresif, maka aktivitas dan pengungkapan terkait CSR akan dianggap sia-sia.

Seperti yang telah disebutkan oleh Lanis dan Richardson (2011) bahwa agresivitas pajak adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan dengan demikian untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan untuk mendapatkan legitimasi dalam masyarakat dan pemerintah, suatu perusahaan seharusnya tidak agresif terhadap pajak. Richardson *et al.*, (2013) menjelaskan lebih lanjut bahwa sesuai dengan mekanisme pelaksanaan *corporate governance* harus mendukung kepatuhan terhadap hukum pajak dan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif serta kegiatan terkait CSR diharapkan mendasari dukungan terhadap undang-undang pajak, sehingga perusahaan dapat berjalan dan bertahan dalam masyarakat secara berkelanjutan.

### **2.1.2 Teori Agensi**

Hendriksen dan Breda (2002:221) menjelaskan bahwa pihak prinsipal mengadakan kontrak dengan pihak lain (agen) untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal atau evaluator informasi. Prinsipal bertanggung jawab memilih sistem informasi untuk membuat keputusan terbaik demi kepentingan pemilik (fungsi utilitas). Menurut Jensen dan Meckling (1976) *Agency Theory* adalah:

*“A contract under which one or more persons (the principal/s) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involve delegating some decisions making authority to the agent.”*

Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemilik dan manajer. Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sulit tercapai

karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*), karena agen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibanding prinsipal. Dengan asumsi bahwa individu bertindak dengan tujuan untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan asimetri informasi yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal.

Beberapa kemungkinan masalah atau konflik yang dapat terjadi antara *principal* dan *agent* yang biasa disebut *agency conflict* di mana merupakan konflik yang muncul karena keinginan manajemen untuk melakukan tindakan sesuai dengan kepentingannya yang mungkin dapat mengorbankan kepentingan prinsipal dalam mendapatkan keuntungan perusahaan. *Agency conflict* yang mungkin dapat muncul antara lain :

1. *Moral Hazard*

Menurut Hendriksen dan Breda (2002, hal. 222) *moral hazard* adalah perilaku tidak jujur yang mengorbankan kepentingan pihak lain. Dalam perspektif teori *agency moral hazard* terjadi akibat konflik kepentingan dan asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Dapat diambil contoh misalnya manajemen lebih memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan mereka, bukan yang paling menguntungkan.

2. *Risk Aversion*

Manajemen cenderung untuk mengambil posisi aman bagi mereka sendiri dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, mereka akan mengambil

keputusan yang sangat aman dan masih dalam kemampuan manajer. Mereka akan menghindari keputusan yang dianggap berisiko bagi perusahaan, meskipun itu bukan pilihan yang terbaik.

Subramaniam, *et al.*, (2009) menjelaskan bahwa secara umum *agent* diasumsikan bertindak berdasarkan kepentingan diri mereka sendiri dan *principal* mempunyai dua kesempatan utama untuk mengurangi berbagai biaya yang timbul dari masalah keagenan tersebut, yaitu :

1. Mengawasi perilaku *agent* dengan mengadopsi mekanisme auditing dan tata kelola lainnya yang sesuai dengan kepentingan *agent* dan *principal*.
2. Menyediakan insentif atau dorongan pekerjaan yang menarik kepada *agent* dan mengatur struktur *reward* yang dapat mendorong *agent* untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik *principal*.

Penggunaan teori agensi ini banyak digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya khususnya tentang pembentukan komite seperti Komite Audit, Komite Nominasi, dan Komite Remunerasi (Subramaniam, *et al.*, 2009). Secara umum komite tersebut merupakan mekanisme pengawasan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam melakukan sistem pengawasan yang baik dan efektif. Komite-komite tersebut dapat dipastikan selalu ada pada situasi di mana *agency cost* tinggi, seperti *leverage* yang tinggi dan kompleksitas dan ukuran perusahaan yang lebih besar (Subramaniam, *et al.*, 2009).

Dari perspektif teori agensi, Dewan Komisaris merupakan mekanisme kunci pengawasan yang digunakan untuk mengurangi kerugian residual kepada pemegang saham perusahaan, dengandemikian mereka mampu mengendalikan masalah

(Richardson *et al.*, 2013). Richardson *et al.*, (2013) juga berpendapat bahwa sistem pengendalian internal perusahaan merupakan alat tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang penting. Selain itu, mereka menegaskan bahwa mandat tanggung jawab untuk menerapkan kerangka terintegrasi atas pengelolaan risiko yang efektif terletak pada manajer, dan desain sistem pengendalian internal serta kepatuhan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur merupakan aspek penting dari kerangka kerja ini. Dengan demikian, sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif memungkinkan Dewan Komisaris melakukan monitoring dan mengelola risiko yang lebih baik.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan risiko perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Manajemen Risiko atau Komite Pengawas Risiko. Dengan adanya Komite Manajemen Risiko (RMC) diharapkan perusahaan melalui Dewan Komisaris-nya dapat melakukan pengawasan dan pengelolaan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang lebih efektif. Sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif seharusnya mampu mengurangi kemungkinan-kemungkinan risiko dan konflik kepentingan yang terjadi di perusahaan, termasuk risiko perpajakan yang rumit. Dengan adanya RMC yang mampu menjalankan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif sebagai salah satu dari mekanisme fungsi pengawasan Dewan Komisaris, maka perusahaan diharapkan akan lebih terhindar dari kemungkinan risiko tindak agresivitas pajak yang merugikan perusahaan.

### 2.1.3 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh *stakeholder* dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Yasin dkk. (2013:6)). Dengan demikian CSR adalah wujud tanggung jawab dan *feedback* kepada masyarakat atas operasi perusahaan dengan tujuan mendapat respon dan dukungan yang baik dan positif dari masyarakat. Lanis dan Richardson (2011) menyatakan bahwa CSR merupakan faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan.

Definisi *Corporate Social Responsibility* menurut Wikipedia Indonesia adalah bahwa:

“Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (bukan hanya) perusahaan adalah memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional.”

Definisi lain mengenai CSR juga dikemukakan oleh *World Bank* yang memandang CSR sebagai:

*“The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”.*

Dengan kata lain CSR dianggap sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap kinerja pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan karyawan dan perwakilan mereka dalam komunitas setempat dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara yang baik di mana baik untuk dunia usaha dan juga untuk pembangunan.

*Corporate Social Responsibility* didefinisikan “bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara perusahaan tersebut beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian” (Lanis dan Richardson 2011). Lanis dan Richardson (2011) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Akan tetapi, bagi beberapa perusahaan dalam mengungkapkan CSR adalah tidak wajib, meskipun di Indonesia sekarang pengungkapan CSR adalah wajib bagi setiap perusahaan.

CSR dapat pula digunakan sebagai suatu bentuk keunggulan dari pesaing-pesaing lain dalam pencapaian keuntungan. Jika suatu perusahaan telah melakukan aktivitas CSR dan telah melakukan pengungkapan terkait aktivitas CSR secara luas dan menyeluruh, maka akan memaksa para pesaingnya untuk melakukan aktivitas yang sama atau paling tidak sejalan. Apabila pesaing tidak menerapkan aktivitas tersebut maka dimungkinkan mereka akan kehilangan pengakuan dan loyalitas konsumen, dan konsumen akan beralih pada mereka yang lebih banyak melakukan aktivitas terkait sosial masyarakat. Namun selain itu, beberapa perusahaan terlibat dalam aktivitas CSR karena yakin bahwa hal tersebut benar untuk dilakukan oleh perusahaan.

#### **2.1.4 CSR Disclosure**

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sering disebut sebagai *social disclosure*, yaitu proses penyampaian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi. Pengungkapan CSR perusahaan melalui banyak media dilakukan

sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga untuk menjaga reputasi. Sebagian perusahaan bahkan menganggap bahwa menyampaikan kegiatan dan program CSR sama pentingnya dengan kegiatan CSR itu sendiri. Dengan menyampaikan CSR-nya, banyak masyarakat yang akan mengetahui investasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan sehingga tingkat risiko perusahaan dalam menghadapi masalah sosial akan lebih kecil.

Di Indonesia, belum ada standar khusus yang mengatur pelaporan pertanggungjawaban sosial (*CSR disclosure*), karena masih sulitnya mengukur biaya dan manfaat sosial perusahaan di masa depan. Umumnya perusahaan menggunakan konsep dari GRI (*Global Reporting Initiative*) sebagai acuan dalam penyusunan pelaporan CSR. Namun, pengukuran GRI dianggap kurang sesuai untuk diterapkan di Indonesia karena cakupan bahasanya yang sudah terlalu khusus, sedangkan di Indonesia sendiri cakupan aktivitas CSR yang dilakukan masih bersifat umum.

Beberapa peneliti Indonesia sebelumnya lebih sering menggunakan indikator pengukuran yang dilakukan oleh Sembiring (2005). Menurut Sembiring (2005) pengukuran pengungkapan CSR dilakukan dengan menggunakan metode *checklist* berdasarkan tujuh kriteria yang diadopsi dari penelitian Hackson dan Milne (1996) yang menghasilkan 90 item pengungkapan. Namun, berdasarkan peraturan Bapepam No.VIII.G.2 tentang laporan tahunan, maka harus dilakukan penyesuaian terhadap 90 item pengungkapan tersebut. Dua belas item dihapus karena dianggap tidak sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di Indonesia sehingga tersisa 78 item pengungkapan.

Penelitian ini menggunakan pengukuran pengungkapan CSR dengan menggunakan instrumen pengukuran yang mengacu pada instrumen yang digunakan

oleh Sembiring (2005) karena banyak peneliti Indonesia sebelumnya yang telah menggunakan maka diharapkan hasil yang ada akan lebih valid dan akurat.

### **2.1.5 Manajemen Risiko**

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk, penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya (Wikipedia.org). Strategi yang dapat digunakan adalah seperti, memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, atau menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

Manajemen risiko mengajak kita untuk secara logis, konsisten, dan sistematis melakukan pendekatan terhadap ketidakpastian masa depan, sehingga memungkinkan kita untuk secara lebih hati-hati (*prudent*) dan produktif menghindari hal-hal yang tidak berguna karena membuang sumber daya yang tidak perlu dan mencegah hal-hal yang merugikan atau bahkan meraup dan mengejar hal-hal yang bermanfaat (KNKG, 2011). KNKG (2011) menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko yang baik antara lain dapat :

1. Mengurangi kejutan-kejutan yang kurang menyenangkan. Ini dapat diperoleh karena melalui penerapan manajemen risiko yang baik semua hal yang berakibat pada pencapaian sasaran perusahaan telah diidentifikasi sebelumnya dan langkah perlakuan terhadap hal tersebut telah diantisipasi.

2. Meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan menjadi semakin baik. Hal ini diperoleh karena dalam menerapkan manajemen risiko wajib untuk menemukenali para pemangku kepentingan dan harapannya.
3. Meningkatkan reputasi perusahaan, karena komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan dan mereka mengetahui bahwa perusahaan mampu untuk menangani risiko-risiko yang dihadapi dengan baik.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, karena semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi telah diidentifikasi dengan baik.
5. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien.

Manajemen risiko merupakan bagian integral dari praktek bisnis yang baik. Sistem pengendalian internal telah menjadi mekanisme kunci *corporate governance* untuk Dewan Komisaris perusahaan dalam mengelola risiko (Richardson *et al.*, 2013). Kebijakan pajak perusahaan merupakan bagian terintegrasi dari sistem manajemen risiko dan pengendalian internal terkait (Richardson *et al.*, 2013).

#### **2.1.6 Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)**

Manajemen risiko adalah suatu proses yang kompleks meliputi identifikasi, mengatur dan meminimalkan risiko bisnis, baik risiko finansial maupun operasional perusahaan (Subramaniam *et al.*, 2009). Dengan mendirikan RMC diharapkan dapat memudahkan Dewan Komisaris agar lebih efektif dalam melakukan estimasi, pengawasan, pengukuran risiko dan menghitung kesempatan yang dihadapi oleh perusahaan.

Pembentukan dan pengungkapan RMC menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen dalam pencapaian *corporate governance* yang berkualitas tinggi. Perusahaan yang memiliki RMC dapat dikatakan memiliki kekuatan yang lebih dibanding perusahaan yang tidak memiliki RMC. Seperti yang disebutkan dalam laporan tahunan PT Bakrie & Brothers Tbk. tahun 2008 bahwa :

“Komite manajemen risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kebijakan manajemen risiko yang diterapkan direksi serta memastikan bahwa semua risiko telah diantisipasi dan aset-aset berisiko telah diasuransikan dengan semestinya.”

Komite Manajemen Risiko merupakan mekanisme pengawas risiko yang penting bagi perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Lebih lanjut, secara umum area tugas dan wewenang RMC adalah :

1. Mempertimbangkan strategi manajemen risiko organisasi.
2. Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi.
3. Menaksir pelaporan keuangan organisasi.
4. Memastikan bahwa organisasi dalam prakteknya memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan tugasnya, anggota dari RMC diharapkan dapat berdiskusi dengan para personel internal perusahaan (Krus dan Orowitz, 2009). Diskusi dilakukan untuk membahas hal-hal mengenai penerapan manajemen risiko, peninjauan ulang kecukupan dan pengelolaan prosedur risiko, dan pelaporan temuan-temuan kepada Dewan Komisaris (Subramaniam, *et al.*, 2009).

Keberadaan RMC dapat tergabung dengan Komite Audit atau menjadi komite yang berdiri sendiri dan terpisah dari Komite Audit. RMC bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan membantu mereka dalam keseluruhan aspek pengawasan

manajemen risiko perusahaan (Subramaniam *et al.*, 2009). Perusahaan dengan RMC yang berdiri sendiri terpisah dari Komite Audit akan lebih fokus pada proses dan pelaporan risiko, dan diharapkan mampu menyediakan kualitas pengawasan internal yang lebih baik dibanding perusahaan dengan RMC yang tergabung di dalam Komite Audit. RMC yang tergabung di dalam Komite Audit dimungkinkan melakukan kesalahan pelaporan keuangan yang lebih besar dibanding yang terpisah dari Komite Audit karena adanya dualitas fungsi dari anggotanya, yaitu sebagai yang melakukan pengawasan terhadap manajemen risiko sekaligus sebagai anggota yang aktif dalam pelaporan laporan keuangan. Baik berdiri sendiri atau bergabung di dalam Komite Audit, keduanya memiliki manfaat sekaligus konsekuensi masing-masing.

### **2.1.7 Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak merupakan hal yang telah umum terjadi di perusahaan-perusahaan di dunia. Agresivitas pajak adalah aktivitas yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak melalui cara legal, ilegal, atau kedua-duanya. Meskipun tindakan tersebut bertujuan untuk meminimalkan pajak perusahaan, tapi tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan merugikan pemerintah juga.

Pembayaran pajak perusahaan seharusnya memiliki implikasi bagi masyarakat dan sosial karena membentuk fungsi yang penting dalam membantu mendanai penyediaan barang publik dalam masyarakat, termasuk hal-hal seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat, transportasi umum, dan penegakan hukum (Lanis dan Richardson, 2011). Selain itu Lanis dan Richardson (2011) juga menjelaskan, isu yang paling signifikan yang timbul dalam upaya menerapkan prinsip-

prinsip CSR untuk pajak perusahaan meliputi tindakan-tindakan yang dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui penghindaran pajak perusahaan dan perencanaan pajak.

Lanis dan Richardson (2013) menyebutkan bahwa agresivitas pajak adalah strategi perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Lanis dan Richardson (2011) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai keinginan dan tindakan meminimalkan beban pajak dengan cara legal, ilegal, atau keduanya. Selain itu, menurut Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif.

Risiko pajak termasuk risiko membayar pajak kurang dari yang disyaratkan dalam undang-undang pajak, dan kerusakan reputasi yang timbul dari kesalahan tersebut dapat mengakibatkan biaya tambahan. Dewan Komisaris memiliki kewajiban penting untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pajak yang berisiko, sehingga terjadi keseimbangan antara risiko dan peluang dalam perusahaan (Richardson *et al.*, 2013). Pajak merupakan komponen penting dari sistem manajemen risiko dan pengendalian internal (Richardson *et al.*, 2013) :

“Aturan yang sama berlaku untuk risiko pajak dalam hal pengakuan dan pengendalian risiko bisnis umum dan membangun lingkungan pengendalian secara umum yang biasanya menjadi tugas dewan.”

Ada berbagai macam proksi pengukuran agresivitas pajak, antara lain *Effective Tax Rates* (ETR), *Book Tax Differences*, *Discretionary Permanent* BTDs (DTAX), *Unrecognize Tax benefit*, *Tax Shelter Activity*, dan *Marginal tax rate*. Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat agresivitas perusahaan menggunakan proksi yang digunakan Lanis dan Richardson (2011) yaitu *Effective Tax Rates* (ETR). Alasan

mengapa menggunakan ETR adalah karena peneliti-peneliti sebelumnya seperti Dyreng *et al.*, 2008; Khurana dan Moser, 2009; Lanis dan Richardson, 2011; Hlaing, 2012; Lanis dan Richardson, 2013; Richardson *et al.*, 2013; telah banyak yang menggunakannya dan indikator ini sementara dinilai sebagai indikator yang hasilnya paling akurat.

Nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya agresivitas pajak apabila memiliki ETR yang mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

## **2.1.8 Variabel Kontrol**

### **2.1.8.1 Ukuran Perusahaan(*Size*)**

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik penting. Ukuran perusahaan adalah suatu skala pengklasifikasian besar-kecilnya perusahaan melalui total aset, *log size*, nilai pasar saham, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan yang digunakan adalah total aset. Total aset menggambarkan seluruh sumber daya perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan. Semakin besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan, dan sebaliknya.

Perusahaan yang besar tentu akan menjaga nama baik dan reputasinya dengan mengungkapkan informasi yang relevan, memiliki sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif, dan melakukan tanggung jawab sosial

untuk mendapatkan kesan yang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Chen *et al.*, (2008) yang mengatakan bahwa perusahaan dengan skala besar akan mengungkapkan CSR lebih luas dan lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang lebih kecil dalam laporan tahunan karena visibilitas yang lebih tinggi.

Perusahaan dengan ukuran besar pada umumnya cenderung untuk mengadopsi praktik *corporate governance* yang lebih baik dibanding perusahaan kecil. Hal ini terkait dengan beberapa alasan, antara lain perusahaan dimungkinkan memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada para *stakeholder* dibanding perusahaan kecil karena dasar kepemilikan yang lebih luas, sehingga perusahaan dituntut untuk menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif (Sambera, 2013).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang CSR telah banyak dilakukan, demikian juga dengan penelitian terkait agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, masih sedikit penelitian yang mengkaitkan antara luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan dan Keberadaan Komite Manajemen Risiko perusahaan dengan aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Watson pada tahun 2011 yang berjudul “*Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Examination of Unrecognized Tax Benefits*” memberikan bukti bahwa aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan secara konsisten dapat mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan di Amerika Serikat pada tahun 2007-2008 dengan menggunakan analisis regresi berganda *Ordinary Least*

*Square* (OLS). Variabel independen dalam penelitian ini adalah CSR yang diukur dengan mengumpulkan data CSR dari *KLD STATS database* dimana KLD menyediakan nilai bulat dari “*strength*” dan “*concern*” yang terbagi dalam tujuh kategori yang terbagi lagi menjadi 100 sub-kategori atau item. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak perusahaan yang diproksikan dalam UTBs (*Unrecognized Tax benefits*). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini antara lain profitabilitas (ROA), *leverage* (LEV), *foreign income* (FI), *sales growth* ( $\Delta SALES$ ), *research and development expense* (R&D), adanya kerugian fiskal dari operasi bersih (NOL). Ukuran perusahaan (*natural log of assets*, SIZE), dan pertumbuhan (*market-to-book ratio*, MB).

Selanjutnya terdapat penelitian Roman Lanis dan Grant Richardson, penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 yang berjudul “*Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis*”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CSR yang diproksikan dalam *CSR disclosure* yang terbagi dalam 52 item pengungkapan. Sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak perusahaan yang diproksikan dalam dua proksi ETR (*Effective Tax Rates*). Alat uji statistik yang digunakan adalah analisis regresi Tobit, dan hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan publik Australia yang terdaftar dalam *Aspect-Huntley Financial Database* selama periode tahun 2008-2009. Penelitian itu menggunakan variabel kontrol antara lain proporsi anggota dewan komisaris independen (BODI), *trouble* (TROUBLE), umur perusahaan (AGEPUB), struktur

kepemilikan saham oleh manajemen (MTOBOD), CEO *tenure* (CEOTENURE), CEO *duality* (CEODUAL), kepemilikan saham minoritas (BLOCKHLD), ukuran perusahaan (SIZE), *leverage* (LEV), *capital intensity* (CINT), *inventory intensity* (INVINT), *research and development intensity* (RDINT), pertumbuhan perusahaan (MKTBK), profitabilitas (ROA), dan sektor industri (INDSEC).

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Roman Lanis dan Grant Richardson pada tahun 2013. Namun, pada penelitian terbarunya Lanis dan Richardson menguji teori legitimasi dan penelitiannya berjudul "*Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory*". Pada penelitian tersebut variabel dependen yang digunakan adalah CSR dan variabel independennya adalah agresivitas pajak menggunakan analisis regresi OLS. Hasil empiris secara konsisten menunjukkan hubungan positif dan signifikan agresivitas pajak perusahaan dan pengungkapan CSR yang membenarkan teori legitimasi dalam konteks agresivitas pajak.

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Grant Richardson, Grantley Taylor, dan Roman Lanis pada tahun 2013 yang berjudul *The Impact Of Board Of Director Oversight Characteristics On Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis*. Penelitian ini menguji bagaimana dampak dari karakteristik pengawasan Dewan Direksi terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini dilakukan di Australia pada tahun 2013. Berdasarkan 812 data-set tahunan perusahaan dari 203 perusahaan Australia yang terdaftar di *Australia Stock Exchange* selama periode 2006-2009, hasil regresi menunjukkan bahwa jika perusahaan yang telah membentuk sistem manajemen risiko dan kontrol internal yang efektif, melibatkan auditor eksternal *big-4*, layanan auditor eksternal melibatkan jasa non-audit secara proporsional lebih sedikit dari jasa

audit dan komite audit internal lebih independen, maka kecil kemungkinannya untuk menjadi agresif terhadap pajak.

Berikut adalah ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu :

**Tabel 2.1**

**Ringkasan penelitian Terdahulu**

No	Judul penelitian	Peneliti	Variabel dan Analisis	Hasil penelitian
1.	<i>Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness : An Examination of Unrecognized Tax Benefits.</i>	Watson (2011)	Variabel dependen: agresivitas pajak (UTBs). Variabel independen: CSR Analisis regresi OLS.	Aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan secara konsisten dapat mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan
2.	<i>Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness : An Empirical Analysis</i>	Lanis dan Richards on (2011)	Variabel dependen: agresivitas pajak (ETR) Variabel independen: CSR Menggunakan analisis regresi Tobit	Memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan.
3.	<i>Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness : a test of legitimacy theory</i>	Lanis dan Richards on (2013)	Variabel dependen: CSR Variabel independen: agresivitas pajak Menggunakan analisis regresi OLS	Hasil empiris secara konsisten menunjukkan hubungan positif dan signifikan agresivitas pajak perusahaan dan pengungkapan CSR yang membenarkan teori legitimasi dalam konteks agresivitas pajak.
4.	<i>The Impact Of Board Of Director Oversight Characteristics On Corporate Tax</i>	Grant Richards on, Grantley Taylor, dan Roman	Var. Independen : <i>Risk Management System and Internal Control, Audit Big-4, Eksternal Auditor Independence, and Internal Audit</i>	Jika perusahaan telah membentuk sistem manajemen risiko dan kontrol internal yang efektif, melibatkan auditor eksternal big-4, layanan auditor eksternal melibatkan jasa

	<i>Aggressiveness : An Empirical Analysis.</i>	Lanis (2013)	<i>Committee Independence.</i> Variabel dependen: Agresivitas pajak	non-audit secara proporsional lebih sedikit dari jasa audit dan komite audit internal lebih independen, maka kecil kemungkinannya untuk menjadi agresif terhadap pajak.
--	--	--------------	---	---

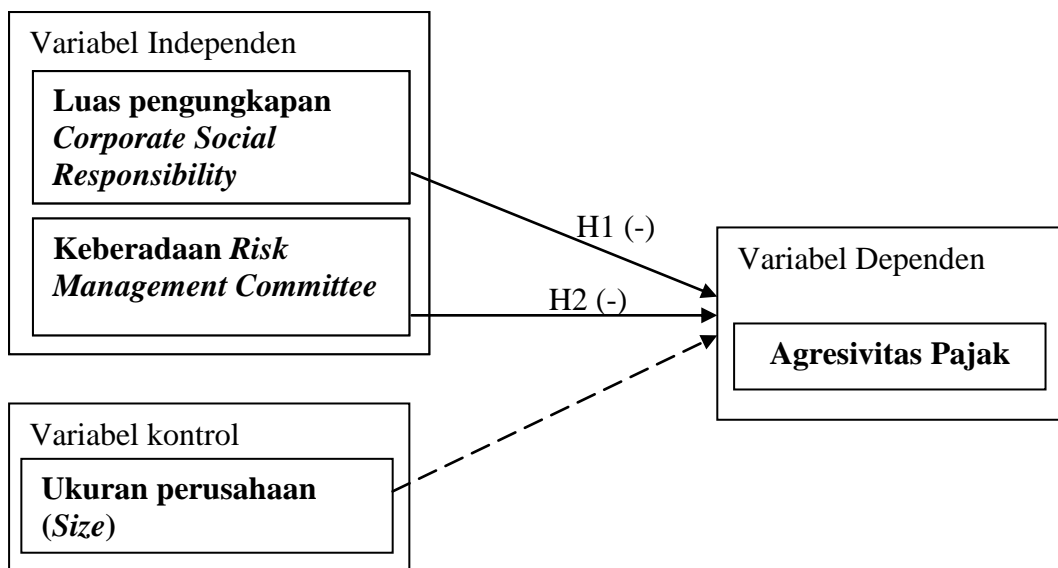
Sumber : Review dari berbagai sumber

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menguji bagaimana pengaruh luas pengungkapan CSR dan keberadaan RMC terhadap agresivitas pajak perusahaan. Oleh karena itu dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 2.1.**

#### **Kerangka Pemikiran**



## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Luas Pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan**

Kinerja perusahaan tidak lepas dari lingkungan dan masyarakat. Salah satu bentuk interaksi perusahaan dengan masyarakat adalah melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan menarik perhatian masyarakat agar perusahaan tersebut mendapatkan kesan yang baik dan diterima oleh masyarakat. Perusahaan dituntut untuk melakukan CSR agar dapat memperbaiki legitimasi dari masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila dapat memenuhi harapan masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kinerja perusahaan dikatakan baik apabila mampu memperoleh laba yang tinggi pada tahun berjalan. Laba perusahaan yang tinggi dapat diperoleh dengan cara meminimalkan beban-beban perusahaan. Salah satu beban yang dimiliki oleh perusahaan adalah beban dalam membayar pajak. Tindakan meminimalkan beban pajak atau agresivitas pajak di kalangan perusahaan-perusahaan besar sering terjadi, tidak terkecuali di Indonesia. Tindakan tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat karena mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam menyediakan barang publik (Lanis dan Richardson, 2013). Kewajiban dalam membayar pajak seharusnya dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan. Namun, banyak perusahaan justru melanggar peraturan perundang-undangan pajak dengan mengurangi pajak yang seharusnya dibebankan

kepada perusahaan tersebut. Perilaku ini membuat manfaat pajak tidak maksimal dalam menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas perusahaan yang melakukan agresivitas pajak akan meminimalkan pembayaran pajak perusahaan demi pencapaian keuntungannya. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan baik dari segi finansial maupun non-finansial. Apabila dari segi finansial perusahaan dapat memperoleh laba yang tinggi dengan membayar pajak yang rendah. Namun di sisi lain, pemerintah akan mengalami kerugian akibat dari tindakan kecurangan tersebut. Sedangkan dari segi non finansial, perusahaan yang terlibat dalam agresivitas pajak akan mendapat tanggapan negatif dari masyarakat. Tanggapan tersebut merupakan bentuk kegagalan perusahaan dalam memenuhi harapan masyarakat karena melakukan kecurangan terhadap pembayaran pajak (Lanis dan Richardson, 2011).

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak agresif terhadap pajak. Hal ini karena apabila perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik tapi masih bertindak agresif terhadap pajak, maka akan membuat perusahaan tersebut kehilangan reputasi di mata masyarakat dan keseluruhan *stakeholder*-nya dan akan menghilangkan dampak positif terkait dengan kegiatan CSR yang telah dilakukan.

Berdasar uraian di atas maka, hipotesis pertama penelitian ini adalah :

**H1 : Luas pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak**

#### **2.4.2 Pengaruh Keberadaan RMC Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan**

Sistem manajemen risiko dan pengendalian internal perusahaan merupakan salah satu mekanisme dan alat tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang penting. Tanggung jawab untuk menerapkan kerangka kerja pengelolaan risiko terintegrasi yang efektif terletak pada manajer, dan desain sistem pengendalian internal dan kepatuhan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur merupakan aspek penting dari kerangka kerja tersebut. Dengan demikian, sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif memungkinkan Dewan komisaris untuk memonitor dan mengelola risiko dengan lebih baik.

Perusahaan dengan pengawasan yang lebih efektif dari manajemen seharusnya cenderung untuk tidak terlibat dalam kesalahan pelaporan keuangan dan penipuan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan di mana Dewan Komisaris membentuk sebuah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif menjadi cenderung kurang untuk berpartisipasi dalam agresivitas pajak. Dalam hal ini Dewan Komisaris membentuk suatu Komite Manajemen Risiko sebagai pelaksana sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, baik terpisah atau pun bekerja bersama di dalam Komite Audit. Dengan adanya Komite Manajemen Risiko ataupun Komite Pengawas Risiko maka diharapkan perusahaan tidak akan melakukan aktivitas pajak agresif karena hal tersebut dinilai akan secara potensial merugikan perusahaan.

Perusahaan dengan sistem manajemen risiko yang lebih kuat atau lebih efektif cenderung tidak akan melakukan kesalahan dalam mengutarakan atau salah melaporkan pendapatan keuangan atau kena pajak. Mereka mengurangi kesempatan

untuk terlibat dalam kegiatan yang mengarah untuk manfaat manajemen eksekutif, dan cenderung untuk tidak terlibat dalam agresivitas pajak yang kompleks.

Dewan Komisaris melalui RMC yang dibentuknya bersama-sama melakukan fungsi pengawasan dan menentukan strategi kebijakan jangka panjang dan jangka pendek yang menguntungkan bagi perusahaan, tapi tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi terkait perpajakan. Pengawasan yang dilakukan oleh RMC dilakukan agar tidak terjadi asimetri informasi antara manajemen dengan para *stakeholder*. Dengan adanya RMC baik terpisah atau berada di dalam Komite Audit, maka dalam setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris beserta manajemen dan para *stakeholder* akan menjamin hasil yang efektif dan efisien termasuk pada kebijakan manajemen pajak yang tidak agresif

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua yang dapat diajukan adalah:

**H2 : Keberadaan RMC berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.**

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab metode penelitian berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional. Pada bab ini terdapat beberapa bagian yaitu variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

Pada bagian pertama, akan dijelaskan mengenai definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, dijelaskan juga cara pengukuran variabel tersebut secara operasional. Populasi dan sampel berisi uraian mengenai anggota populasi, kriteria dan jumlah sampel yang akan diambil, serta metode pengambilan sampel untuk penelitian. Jenis dan sumber data berisi pembahasan mengenai jenis data dari variabel dan sumber dari data penelitian. Jenis data variabel dapat terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Di dalam bagian metode pengumpulan data dijelaskan metode pengambilan data penelitian yang digunakan. Metode pengambilan data dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, di bagian akhir bab ini dibahas mengenai teknik analisis dan mekanisme penggunaannya, termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan deskripsi, alasan penggunaan alat analisis, serta pengujian asumsi dari teknik analisis tersebut.

### 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

#### 3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah kecenderungan dan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal, maupun kedua-duanya. Penelitian ini mengukur agresivitas pajak dalam satu proksi pengukuran utama yaitu *Effective Tax rates* (ETR) sesuai dengan model proksi Lanis dan Richardson (2011) yang dihitung dari:

$$ETR = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak (EBT)}}$$

*Effective Tax Rate* (ETR) adalah presentase besarnya beban pajak efektif yang harus dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Proksi ETR ini dipilih karena pengukuran ini telah banyak digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, khususnya di Indonesia, antara lain seperti Anggraini dan Retno (2006), Yulita (2010), Setiawati dkk. (2012), Yoehana (2013), dan Octaviana (2014). Selain itu pemilihan proksi ETR ini adalah untuk menyederhanakan interpretasi terkait hasil penelitian.

Nilai ETR yang rendah menunjukkan adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak, perusahaan dengan tetap menjaga laba akuntansi

keuangan, maka perusahaan akan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, ETR dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak. Beban pajak penghasilan yang digunakan adalah total beban pajak penghasilan yang tertera di laporan laba-rugi perusahaan pada tahun sampel.

### 3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Keberadaan *Risk Management Committee* dari perusahaan pertambangan. Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang sama pentingnya dengan kegiatan CSR itu sendiri. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator pengungkapan CSR oleh Sembiring (2005) yang telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan BAPEPAM No.VIII.G.2.

Pengungkapan tersebut terdiri dari tujuh kategori yaitu lingkungan, energi, kesehatan, dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan pertambangan adalah sejumlah 78 item yang terdiri atas kategori lingkungan (13 item), kategori energi (7 item), kategori kesehatan dan keselamatan tenaga kerja (8 item), kategori lain-lain tenaga kerja (29 item), kategori produk (10 item), kategori keterlibatan masyarakat (9 item), dan kategori umum (2 item). Maka rumus untuk pengukuran pengungkapan CSR yaitu:

$$CSRI_i = \frac{\sum X_{yi}}{ni}$$

Keterangan:

CSRI<sub>i</sub> : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

$\sum X_{yi}$  : Nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan.

y : Item yang diharapkan diungkapkan

n<sub>i</sub> : Jumlah item untuk perusahaan i,  $n_i \leq 78$ .

Variabel independen lainnya adalah Keberadaan komite manajemen risiko, yaitu suatu komite yang mengelola dan menilai ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman atau suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk, penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi risiko dengan menggunakan pengelolaan sumberdaya. *Risk Management Committee* (RMC) merupakan suatu komite yang memberikan perhatian penuh pada pengawasan risiko dan tidak berbagi fokus pada pemenuhan standar akuntansi (Krus dan Orowitz, 2009 dalam Sambera, 2013). Keberadaan RMC merupakan salah satu elemen untuk mendukung tercapainya prinsip *good corporate governance*. Namun, *Risk Management Committee* sendiri belum sepenuhnya diterapkan di perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Keberadaan Komite Manajemen Risiko dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi pengukuran yang digunakan oleh Subramaniam *et al.*, 2009 yaitu dengan variabel dummy. Nilai 1 jika perusahaan memiliki dan mengungkapkan bagaimana pembentukan komite manajemen risiko baik berdiri sendiri terpisah dari Komite Audit atau termasuk di dalam Komite Audit, jika tidak nilai 0.

### **3.1.3 Variabel Kontrol**

#### **3.1.3.1 Ukuran perusahaan (*Size*)**

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan menurut Lanis dan Richardson (2013) dapat diukur dengan logaritma natural total aset dengan rumus sebagai berikut:

$$Size = Ln \text{ total aset}$$

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2013. Alasan mengapa memilih periode tersebut adalah untuk mengetahui tren perkembangan terbaru terkait perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Pengambilan populasi pada perusahaan pertambangan ini karena sektor tersebut menjadi perhatian khusus untuk titik utama penerimaan pajak untuk negara seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Direktorat Jenderal Pajak, Suhardi Alius di dalam warta berita yang dipublikasikan di dalam [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com).

Pendapatan yang diperoleh perusahaan pertambangan relatif besar. Selain itu, perusahaan pertambangan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat, karena sektor tersebut berhubungan secara langsung dengan lingkungan, berdampak pada banyaknya kerusakan lingkungan, oleh sebab itu dibutuhkan wujud timbal balik kepada masyarakat.

Metode pengambilan sampel yang diambil dari populasi perusahaan pertambangan ini menggunakan *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjek peneliti. Sampel dipilih berdasarkan pada kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan agar diperoleh sampel yang representatif. Metode ini merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu sehingga sampel penelitian ini menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Melaporkan laporan tahunan lengkap dan berturut-turut dari tahun 2009-2013 di Bursa Efek Indonesia.
2. Mengungkapkan CSR *disclosure* dalam laporan tahunan.
3. Perusahaan yang memiliki ETR antara 0-1 sehingga dapat memudahkan penghitungan. Semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif, sedangkan sumber data yang digunakan merupakan jenis data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang listing di BEI selama tahun 2009 sampai 2013, yang didokumentasikan dalam [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) serta sumber lain yang relevan seperti *Indonesia Capital Market Directory (ICMD)*, *IDX Fact book*, dan *website* resmi perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber informasi terkait perusahaan-perusahaan pada sektor pertambangan yang listing di BEI pada tahun 2009-2013.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka. Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

Selain itu pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data-data sekunder yaitu berasal dari sumber yang ada, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Pencatatan data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Menurut Ghazali (2011) statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi, nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum pada masing-masing variabel, dalam hal ini yaitu agresivitas pajak, luas pengungkapan CSR, keberadaan RMC, dan ukuran perusahaan (*size*).

#### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik terhadap model regresi digunakan agar dapat mengetahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi yang baik atau tidak (Ghozali, 2011 hal. 130). Analisis regresi yang dilakukan dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) harus memenuhi syarat uji asumsi klasik yang

terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011). Uji-t dan uji-F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila nilai residual yang dihasilkan tidak terdistribusi secara normal, maka uji statistik menjadi tidak valid.

Apabila pendeteksian normalitas hanya dengan cara melihat grafik, maka hasil yang didapat akan menyesatkan karena kemungkinan ketidak hati-hatian secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik menunjukkan ketidaknormalan dalam pendistribusian. Oleh sebab itu, dalam pengujian normalitas selain uji grafik harus dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

$H_0$  : Data residual berdistribusi normal

$H_a$  : Data residual tidak berdistribusi normal

### **3.5.2.2 Uji Multikolonieritas**

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolonearitas adalah situasi adanya variabel-variabel bebas diantara satu sama lain. Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

1. Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (di atas 0,95), maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
3. Melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut-off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $\geq 10$  (Ghozali, 2011).

### 3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini akan menggunakan uji *Run test*. *Run test* sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi (Ghozali, 2011). Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau *random*. Ghozali (2011) menjelaskan bahwa *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara *random* atau tidak (sistematis).

#### 3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (homokedastisitas) dimana *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Ada beberapa cara untuk menguji heteroskedastisitas dalam *variance error terms* untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (diagram *scatterplot*) dengan dasar analisis yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

#### 3.5.3 Pengujian Hipotesis

Model penelitian yang akan digunakan adalah dengan menggunakan metode *Multiple Regression* atau Regresi Berganda. Seperti diungkapkan Gozhali (2011) dalam bukunya Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19, bahwa Metode *Multiple Regression* digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel terikat (metrik) terhadap lebih dari satu variabel bebas (metrik).

Analisis regresi berganda yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{TAGit} = \alpha_0 + \beta_1 \text{CSRIit} + \beta_2 \text{RMCit} + \beta_3 \text{SIZEit} + e$$

TAGit	= agresivitas pajak perusahaan <i>i</i> tahun ke- <i>t</i> yang diukur menggunakan proksi ETR
$\alpha_0$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
CSRIit	= Pengungkapan item CSR perusahaan <i>i</i> tahun ke- <i>t</i>
RMCit	= Pernyataan perusahaan terkait keberadaan RMC dalam perusahaan <i>i</i> tahun ke- <i>t</i> , variabel dummy
SIZEit	= Ukuran perusahaan <i>i</i> tahun ke- <i>t</i>
<i>e</i>	= eror (kesalahan pengganggu)

Setelah persamaan regresi terbebas dari asumsi dasar maka langkah selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini meliputi:

### 3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam model. Karena dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen, maka nilai *Adjusted R*<sup>2</sup>

lebih tepat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

### **3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

### **3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).